

**ANALISIS STRATEGI PENYEDIAAN PUPUK BERSUBSIDI BAGI PETANI DI  
KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH  
(Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten Demak)**

**ANALYSIS OF PROVISION STRATEGY OF SUBSIDIZED FERTILIZERS TO FARMERS  
IN DEMAK DISTRICT, CENTRAL JAVA PROVINCE**

**Wiwik Dewi Sumbarwati**

Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro

email: [dewiwiwik44@yahoo.com](mailto:dewiwiwik44@yahoo.com)

Diterima: 18 Desember 2015, Direvisi: 1 Februari 2016, Disetujui: 23 Februari 2016

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor strategis internal dan eksternal, menentukan komponen strategis penentu keberhasilan dan menentukan prioritas strategi penilaian masyarakat berkaitan dengan sarana produksi yang menjadi salah satu kebutuhan utama petani di Kabupaten Demak. Penelitian dilakukan dengan metode Purposive sampling. Pengumpulan informasi responden menggunakan kuesioner, Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan key person. Tujuan penelitian pertama dan kedua dianalisis menggunakan analisis SWOT ( Strength-Weakness-Opportunity-Threat) dan tujuan ketiga dianalisis menggunakan AHP (Analytical Hierarchy Process). Berdasarkan hasil pembobotan pada analisis SWOT, interaksi faktor internal dan eksternal diperoleh alternatif strategi pilihan dengan bobot tertinggi pada kombinasi Strategi Strength-Opportunity (SO). Pada analisis AHP dimulai dengan penyusunan hirarki model AHP, tujuan hirarkinya adalah “Analisis Strategi Pupuk bersubsidi sampai ke Petani”, yang terbagi pada Level 1 merupakan Alternatif kriteria penilaian perencanaan hasil Focus Group Discussion (FGD) ; Level 2 merupakan Alternatif Kriteria Arah Strategi yang merupakan hasil analisis SWOT SO Analisis Strategi Pupuk Bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak.*

**Kata kunci:** Strategi, Pupuk Bersubsidi, RDKK, Sistem tertutup.

**ABSTRACT**

*This research aims to define internal and external strategic factors, determine the component decisive strategic success and determine priority community assessment strategy related to the means of production which became one of the main needs of farmers Development in Demak. Research was done by the method of Purposive sampling. Collection of information using a questionnaire respondents, Focus Group Discussion (FGD) and in-depth interviews with key person. The purpose of the first and second study analyzed using SWOT (Strength Weakness-Opportunity-Threat) and the third goal is analyzed using AHP (Analytical Hierarchy Process). Based on the results of the SWOT analysis, weighting the interaction of internal and external factors obtained alternative strategy options with highest weights on a combination of Strength-Opportunity Strategies (SO). AHP analysis on starting with the preparation of model AHP hierarchy with the goal hierarchy “subsidized Fertilizer Strategy Analysis to the Farmers” is on a Level 1 assessment criteria is an alternative approach to the planning of the results of the Focus Group Discussion (FGD); Level 2 is the Alternative criteria for Subsidized Fertilizer Strategy Direction up to the farmers Development in Demak is SWOT Analysis Results SO.*

**Keywords:** strategy, Subsidized Fertilizer

## PENDAHULUAN

Pembangunan Pertanian di Indonesia tetap dianggap terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi, apalagi semenjak sektor pertanian ini menjadi penyelamat perekonomian nasional karena pertumbuhannya meningkat, sementara sektor lain pertumbuhannya negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia; (1) potensi sumberdaya alamnya yang besar dan beragam, (2) pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar, (3) besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan (4) menjadi basis pertumbuhan di pedesaan (Zaenal, 2008).

Peranan sektor pertanian jika dilihat secara komprehensif sebagai penyediaan pangan masyarakat mampu berperan secara strategis dalam penciptaan ketahanan pangan nasional, menghasilkan bahan baku untuk peningkatan bagi produk sektor industri dan jasa, menghasilkan atau menghemat devisa yang berasal dari ekspor atau produk substitusi impor, merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk sektor industri, sektor pertanian mampu menyediakan modal bagi pengembangan sektor-sektor lain (Hendrawan, 2011). Pemerintah dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional pupuk sangat penting dalam peningkatan produktifitas dan produksi hasil pertanian, pupuk sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi pangan nasional. Begitu pentingnya sehingga pupuk harus tersedia sesuai dengan enam prinsip tepat yaitu tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat harga. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk subsidi untuk mencapai prinsip 6 (enam) tepat tersebut.

Pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana produksi berupa

pupuk ini dalam jumlah yang mencukupi dengan diimbangi harga yang terjangkau bagi petani. Hal inilah yang mendasari pemerintah memberlakukan subsidi pupuk bagi petani. Kebijakan subsidi pupuk ini merupakan suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah agar mampu memberikan insentif bagi petani dalam meningkatkan produksi dan produktifitas pangan, serta peningkatan pendapatan petani. Pupuk selain berperan dalam meningkatkan produktivitas juga meningkatkan mutu hasil komoditas pertanian, melalui penerapan teknologi budidaya yang tepat dengan menggunakan sarana produksi yang direkomendasikan. Efektifitas penggunaan pupuk diarahkan pada penerapan pemupukan berimbang dan organik sesuai standar teknis teknologi pemupukan yang dianjurkan dimasing-masing wilayah spesifik lokasi (Spudnik, 2011).

Sebagian besar kemampuan permodalan petani sangat terbatas, untuk itu Pemerintah memfasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga (Permentan, 2013). Sedangkan jumlah alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani di bawah bimbingan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), hasil penyusunan RDKK direkap dan dilaporkan secara berjenjang dari kelompok tani, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi hingga tingkat pusat melalui Direktorat Jendral Prasarana Sarana Pertanian Jakarta (Dirjen PSP, 2013). Agar dalam pelaksanaan pupuk bersubsidi dapat berjalan lancar maka ditetapkan Peraturan yang memuat tentang

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Permentan, 2013). Permasalahan utama saat musim tanam yaitu pupuk subsidi sulit didapatkan petani. Oleh karena itu sehingga perlu strategi yang tepat agar pupuk bersubsidi sampai ke petani dengan mengacu pada enam tepat yaitu tepat jenis, mutu, jumlah, tempat, waktu dan harga.

### Perumusan masalah

Kabupaten Demak sebagai penyanga pangan Jawa Tengah khususnya dan penyanga pangan nasional pada umumnya, dalam upaya peningkatan produksi dan produktifitas hasil pertanian maka pupuk berperan sangat penting sebagai kebutuhan pokok sehingga keberadaannya strategis di masyarakat.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa perkembangan program pemberian pupuk bersubsidi oleh pemerintah belum efektif mengingat masih banyaknya persoalan yang timbul pada tataran implementasinya. Ada beberapa hal yang sering menjadikan permasalahan pupuk bersubsidi sampai ke petani tidak sesuai sasaran dan tujuan utama pemerintah dalam memberikan subsidi pupuk yaitu : (1) Alokasi pupuk bersubsidi belum sepenuhnya dicukupi sesuai RDKK, (2) Pasar pupuk domestik masih bersifat dualistik, tanpa diikuti dengan pengawasan dan penerapan sangsi secara ketat, sehingga menyebabkan terjadinya perembesan pupuk dari pasar bersubsidi ke pasar non subsidi,(3) maraknya ekspor pupuk secara illegal seiring dengan meningkatnya harga pupuk dari pasar dunia serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat,(4) adanya rasa fanatisme petani terhadap merk pupuk tertentu, dan (5) administrasi penyaluran pupuk bersubsidi masih kurang tertib sehingga penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi masih banyak terjadi di

tingkat penyalur resmi ( lini IV ), (6) adanya kendala keterlambatan produsen maupun distributor dalam pengiriman pupuk bersubsidi yang disebabkan karena faktor iklim, jalan rusak atau jalan dalam perbaikan, volume Gudang Penyangga terbatas, Gudang Penyangga belum optimal menjalankan fungsiya, (7) keterbatasan modal petani sehingga masih banyak ditemui petani dalam membeli pupuk bersubsidi dengan system yernen ( dibayar setelah panen), (8) Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kurang optimal dalam mem-berikan sangsi kepada oknum yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi, (9) Kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah secara mendadak. Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu dilakukan yang tepat agar pupuk bersubsidi sampai ke petani dengan prinsip enam tepat.

Untuk mengetahui strategi penyediaan pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak sesuai enam tepat yaitu tepat jumlah, jenis, mutu, waktu, tempat dan harga, maka perlu diinventarisasi faktor strategis internal dan eksternal. Faktor Strategis Internal meliputi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam hal ini yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi dapat diidentifikasi sebagai berikut ; (1) Ketersediaan lahan pertanian ( sawah, tegal, tambak, kebun), (2) Komitmen penyalur resmi dalam melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani, (3) ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani. Sedangkan Faktor Strategis Eksternal meliputi dukungan pemerintah, inovasi baru teknologi tepat guna, dan regulasi kebijakan pupuk bersubsidi. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor strategis internal dan eksternal untuk menentukan penyediaan pupuk

- bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak?
2. Komponen strategi apa yang dapat dilakukan agar penyediaan pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak?
  3. Prioritas strategi apa yang dapat dilakukan agar penyediaan pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak?

### **Tujuan Penelitian**

1. Menentukan faktor strategis internal dan eksternal penyediaan pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak.
2. Menentukan komponen strategi yang dapat dilakukan agar penyediaan pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak.
3. Menentukan Prioritas strategi yang dapat dilakukan agar penyediaan pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak

### **Tinjauan Pustaka**

#### **1. Arah dan Kebijakan Pupuk Bersubsidi**

Menurut (Rachman,2009) dalam rangka pencapaian ketahanan pangan nasional, diperlukan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana produksi, terutama ketersediaan pupuk. Memasuki akhir dekade 1990-an pemerintah mengumumkan paket kebijakan Desember 1998, yaitu : (1) menghapus perbedaan harga pupuk yang dialokasikan untuk tanaman pangan maupun tanaman perkebunan, (2) menghapus subsidi pupuk,(3) menghilangkan monopoli distributor tunggal dalam penyaluran pupuk,(4) menghapus holding company untuk mendorong berkembangnya kompetisi yang sehat antar produsen pupuk, dan (5) menghapus quota ekspor dan kontrol terhadap impor pupuk.

Memasuki era Reformasi 1998, mekanisme penyaluran pupuk kepada

pasar bebas dimana pemerintah sempat mencabut program subsidi pupuk pada periode 1998-2002. Akan tetapi disadari bahwa pasar pupuk nasional tidak siap untuk langsung menghadapi mekanisme pasar bebas, sehingga pada periode berikutnya sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang program pupuk bersubsidi diberlakukan untuk mengatasi kebutuhan petani, khususnya di sektor pertanian. Pada tahun anggaran 2013, kebijakan subsidi diarahkan melalui Kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran, melalui pengendalian besaran subsidi energy dan subsidi non energy, menyediakan tambahan anggaran untuk antisipasi subsidi tepat sasaran, penajaman penetapan sasaran dan penyaluran dengan memanfaatkan data kependudukan yang tepat dan valid khususnya pupuk bersubsidi dengan mencermati data RDKK.

#### **2. Perencanaan Pupuk Bersubsidi**

Pemerintah berkepentingan melakukan berbagai deregulasi kebijakan di bidang pupuk dengan maksud agar terwujud iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah dalam mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan petani, pekebun, peternak dan petambak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk satu tahun. RDKK merupakan alat pesanan Pupuk bersubsidi. yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dibimbing Petugas Pertanian Lapangan

#### **3. Pengadaan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi**

Sistem distribusi dapat diartikan sebagai rangkaian mata rantai penghubung antara produsen dan konsumen dalam rangka menyalurkan

produk/jasa agar sampai ke tangan konsumen secara efisien dan mudah dijangkau (Spudnik,2011). Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen ke gudang unit pengantongan pupuk (UPP) di pelabuhan (Lini I dan Lini II). Dari UPP pupuk kemudian didistribusikan lagi ke gudang lini III Gudang Penyangga Pupuk atau disebut Gudang Produsen di tingkat Kabupaten, kemudian didistribusikan lagi ke gudang distributor ditingkat Kecamatan lini IV (AKB, 2011).

Pengangkutan dari gudang lini III ke gudang lini IV distributor umumnya menggunakan transportasi darat, menggunakan jalur distribusi sebagaimana diatur menurut Menperindag Nomor 15 Tahun 2013 Pupuk bersubsidi tersedia di Lini II Gudang Penyangga Produsen sebanyak kebutuhan tiga (3) minggu sebelum pemakaian, di gudang distributor 2 minggu sebelum pemakaian dan tersedia di gudang pengecer resmi satu (1) minggu sebelum pemakaian. Sehingga produsen menyediakan pupuk bersubsidi di gudang penyangga pupuk (GPP lini II) minimal mengacu Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati yang memuat jadwal alokasi pupuk bersubsidi per bulan per Kecamatan. Apabila alokasi jadwal per bulan tidak mencukupi dilakukan relokasi oleh Kepala Dinas Pertanian Selaku Ketua I Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida ( KP3) Kabupaten dan Koordinator Pengguna Pengawas Pupuk Bersubsidi Kabupaten.

#### **4. Penggunaan Pupuk Bersubsidi**

Menurut (Tim Subsidi, 2013) Penggunaan pupuk oleh petani pada sebagian lokasi terdapat kebiasaan memupuk dengan dosis melebihi rekomendasi. Penggunaan pupuk yang berlebihan atau kurang akan menurunkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk. Selain pengaruh

musim jenis komoditas yang ditanam juga sering menyebabkan kebutuhan pupuk tidak sama dengan rencana yang dituangkan di RDKK sehingga kebutuhan pupuk pasti berubah.

Mengutip hasil Analisis Kebijakan Pertanian Tahun 2009 bahwa empat hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk yaitu :

- a. Tepat jenis yaitu memilih kombinasi jenis pupuk berdasarkan komposisi unsur hara utama dan tambahan berdasarkan sifat kelarutan, sifat sinergis dan antagonis antar unsur hara dan sifat tanahnya.
- b. Tepat waktu dan frekuensi yang ditentukan oleh iklim/curah hujan, sifat fisik tanah dan unsur hara yang terkandung dalam kemasan pupuk.
- c. Tepat Cara yaitu cara pemberian yang ditentukan berdasarkan jenis pupuk, umur tanaman, jenis tanah.
- d. Tepat dosis yaitu dosis pupuk yang diperlukan berdasarkan analisa statushara tanah dan kebutuhan tanaman.

Penerapan empat tepat tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh perencanaan kebutuhan pupuk yang tepat dan dirinci berdasarkan sifat-sifat tanah, rekomendasi pemupukan spesifik lokasi, luas lahan dan pemilikannya dan komoditas yang diusahakan petani dan kelompok tani. Penggunaan pupuk yang berlebihan ternyata tidak berdampak pada peningkatan hasil usaha tani padi, pemberian subsidi pupuk berguna untuk mengurangi biaya usaha tani.

#### **5. Pengawasan Pupuk Bersubsidi**

Fasilitasi Penyediaan Pupuk bersubsidi sebagai salah satu upaya untuk membantu ketersediaan pupuk bagi petani, perlu dilakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk penyediaan pupuk pemerintah telah menerapkan subsidi pupuk yang

menyebabkan harga pupuk relatif lebih murah dan dapat dijangkau oleh daya beli petani. Dengan memperhatikan kondisi daya beli dan tingkat kesadaran petani dalam menerapkan pemupukan berimbang adalah dengan memberikan pengawasan, pendampingan sejak perencanaan, pelaksanaan distribusi dan aplikasi pupuk di tingkat lapang secara terus menerus. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan pupuk, Pemerintah terus berupaya menyempurnakan regulasi dibidang pupuk agar petani dapat memenuhi sesuai dengan azas 6 tepat termasuk dalam hal mutu dan efektifitasnya. Upaya Pemerintah dalam menyempurnakan regulasi dibidang pupuk tercermin dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Pertanian No. 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pupuk An –organik dan telah dilakukan revisi melalui Peraturan Menteri Pertanian No 08/Permentan/SR.240/2/2007. Beberapa kebijakan deregulasi dibidang pupuk pada hakekatnya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam penyediaan pupuk didalam negeri. Dengan deregulasi tersebut telah mendorong semakin banyaknya pupuk yang terdaftar atau memperoleh ijin edar dari menteri pertanian.

## METODE PENELITIAN

### 1. Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal penggunaan pupuk bersubsidi sampai ke petani dalam mendukung kedaulatan pangan di Kabupaten Demak. Analisis SWOT dilakukan dengan menggunakan matriks SWOT dan menghasilkan empat alternatif strategi yang mampu menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan Internal yang dimilikinya.

Penelitian dilakukan untuk Menganalisis Strategi Pupuk Bersubsidi

Sampai ke petani dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, mutu, tempat dan harga, dalam mendukung program nasional surplus beras 10 juta ton beras pada tahun 2014, Program peningkatan produksi pangan padi jagung kedelai (pajale) sebesar 20% dari tahun sebelumnya dan Program mewujudkan Kedaulatan Pangan Jawa Tengah. Penelitian diawali dengan mengumpulkan data untuk mengetahui perencanaan, pengadaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan pupuk bersubsidi di Kabupaten Demak. Informasi yang dikumpulkan dari responden dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan daftar kuesioner yang telah disiapkan terlebih dahulu. Pengumpulan informasi dari responden juga dilakukan dengan cara *Focus Group Discussion (FGD)* dan wawancara mendalam dengan *key person*.

### 2. Analytical Hierarchy Process (AHP)

Dalam penelitian ini AHP dipakai untuk memberikan bukti kuantitatif dari perumusan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis dalam Mendukung strategi pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak, untuk memperkuat hasil FGD/ Wawancara mendalamnya sehingga memperoleh prioritas alternatif strategi hasil Analisis SWOT.

Konsep AHP adalah merubah nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif, sehingga keputusan yang diambil lebih obyektif (Septiani W, 2009). Tujuan penerapan dalam penelitian ini adalah merumuskan Analisis Strategi Pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak.

*Analytical Hierarchy Process (AHP)* adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi kekurangan dari model pengambilan keputusan yang lainnya. Alat utama dalam

model AHP ini adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya berupa persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dan tidak terukur dipecah ke dalam kelompok-kelompoknya dan kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi sebuah bentuk hirarki (Brojonegoro, 1992).

*Analytical Hierarchy Process* memberikan kemungkinan bagi para pembuat keputusan untuk merepresentasikan interaksi faktor-faktor yang berkesinambungan di dalam situasi yang kompleks dan tidak terstruktur. Alat analisis ini membantu para pembuat keputusan untuk mengidentifikasi dan sekaligus membuat prioritas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, pengetahuan yang dimiliki, dan pengalaman yang mereka miliki untuk masing-masing masalah yang dihadapi (Septiani W, 2009).

Langkah pertama adalah menentukan tujuan berdasarkan latar belakangmasalah yang ada, yaitu: StrategiPerencanaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Demak.

Langkah kedua menentukan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, di dasarkan pada pilihan upaya arah Strategi Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi yang pelakunya produsen, distributor dan penyalur resmi pupuk bersubsidi, hasil Focus Group Discussion (FGD) guna mendukung pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak.

Langkah ketiga adalah menentukan alternatif seperti menentukan kriteria, dilakukan berdasarkan alternatif strategi hasil analisis SWOT. Pada penelitian ini dibahas strategi apa yang dibutuhkan dalam pengawasan pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak.

Ciri pemecahan model AHP adalah menggunakan hirarki yang menguraikan permasalahan yang kompleks menjadi elemen-elemen yang

lebih sederhana. Hirarki dari metode ini dapat dibagi menjadi tujuan, pendekatan pengawalan, arah pengawalan dan strategi.

Proses penyusunan hirarki sebenarnya merupakan proses literasi dimana konsep-konsep, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya menentukan elemen dan level dari suatu hirarki. Ketidakjelasan atau kesalahan dalam proses menjawab pertanyaan akan membuat para pengambil keputusan memilih kriteria atau alternatif yang salah, oleh karena itu semua pertanyaan harus dijawab dan konsisten dengan informasi yang ada. Proses dekomposisi merupakan langkah terpenting penyusunan model AHP, karena langkah ini sebuah validitas dan keampuhan model dapat diuji (Brojonegoro, 1992).

Penelitian dilakukan dalam rangka pemilihanstrategi yang paling tepat pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dan AHP.

Analisis SWOT digunakan untuk menjaring persepsi masyarakat terhadap faktor internal dan eksternal pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak, sehingga didapatkan faktor kekuatan, faktor kelemahan, faktor peluang, dan faktor ancaman. Dari penilaian bobot IFAS (*Internal Factor Analysis System*) dan EFAS (*External Factor Analysis System*), didapatkan beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan dalam memenuhi prinsip enam tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Demak merupakan kabupaten penyangga pangan urutan ketiga di Jawa Tengah setelah Kabupaten Grobogan di urutan ke dua dan urutan

pertama Kabupaten Sragen. Kabupaten Demak produksi padi mencapai 586.079 ton tahun 2013 (Badan Pusat Statistik, 2014). Selain sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura juga berkembang pesat. Sebagai upaya memberdayakan petani dalam mengembangkan sumber daya alam, pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang dibutuhkan petani.

Kebutuhan jumlah pupuk subsidi berdasarkan Rencana Definitif, Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh Kelompok Tani dibawah bimbingan Petugas Pertanian Lapangan (PPL).

Berdasarkan hasil analisis strategi prioritas Strength-Opportunity (S-O); 1). Keberadaan peran pihak pemerintah dan Tim KP3, Tim Verifikasi dapat menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi; 2). Keberadaan Stakeholder termasuk Produsen, Distributor, Pengecer resmi dapat memperkuat kemampuan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani; 3). Adanya kemampuan kelompok tani/ dalam penyusunan RDKK, menerapkan teknologi baru, aplikasi penerapan pemupukan sesuai rekomendasi spesifik lokasi ; 4). Keberadaan akses modal, sarana jalan dan sarana beli petani dapat memacu peningkatan ketersediaan dan kontinyuitas pupuk bersubsidi sampai ke petani; 5). Adanya fasilitas peran pemerintah dalam program/ kegiatan sosialisasi, pelatihan demplot ( uji coba) aplikasi pupuk bersubsidi sesuai rekomendasi spesifik lokasi.

Berdasarkan penentuan prioritas kriteria arah strategi AHP; 1).Pemerintah menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, 2).Aparat bisa menyampaikan aturan dan petunjuk yang ditetapkan pemerintah, 3). Produsen, distributor, pengecer resmi menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi, 4) Kelompok tani mampu dan mau menerapkan teknologi baru, 5)

Peran Pemerintah dalam fasilitasi program dan kegiatan pupuk bersubsidi.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian terhadap penilaian kuesioner SWOT oleh para responden pelaku pupuk bersubsidi, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

- Faktor Kekuatan (*Strength*) utama berkaitan dengan pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak adalah: Komitment penyalur resmi dalam melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi, ketersediaan pupuk bersubsidi penyalur resmi, kontinyuitas penyediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani, kemampuan aparat pelaksana dalam menyampaikan semua aturan dan petunjuk, keberadaan kelompok tani dalam menerapkan inovasi baru, kinerja kelembagaan distributor pupuk bersubsidi, kemampuan pengelolaan penyalur pupuk bersubsidi.
- Faktor Kelemahan (*Weakness*) utama berkaitan dengan pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak adalah: ketersediaan lahan pertanian, ketersediaan modal petani dalam membeli pupuk, kemampuan penyalur resmi pupuk bersubsidi dalam pengelolaan modal, kepemilikan gudang atau transfortasi penyalur resmi, kemampuan distributor menyalurkan pupuk bersubsidi, kapasitas wilayah penyaluran pupuk bersubsidi, kemampuan pembuatan laporan tiap bulan distributor/penyalur resmi pupuk bersubsidi, pendapatan distributor/penyalur resmi dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.
- Faktor Peluang (*Opportunity*) yang utama berkaitan dengan pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak adalah: dukungan pihak pemerintah, luas

sawah/tegal/tambak kebun petani yang dikelola, semangat petani dalam usaha tani, sarana jalan transformasi, keberadaan penyalur resmi pupuk bersubsidi, fasilitas penunjang penyaluran pupuk bersubsidi, pengetahuan pengawalan teknologi petani, kemampuan daya beli petani, pengawasan tim KP3 Kabupaten, pelaksanaan tim verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi, pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait, produsen, distributor, penyaluran resmi.

- Faktor Ancaman (*Threat*) yang utama berkaitan dengan pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak adalah Fasilitas penunjang penyaluran pupuk bersubsidi, keberadaan akses modal, dukungan penyuluhan pendamping, dukungan pihak swasta, persaingan pupuk bersubsidi dengan non subsidi, perkembangan teknologi informasi, bantuan demplot aplikasi pupuk berimbang.

Berdasarkan hasil pembobotan terhadap kuesioner SWOT, maka usulan strategi alternatif yang dapat direkomendasikan adalah Strategi *Strength–Opportunity (SO)*, yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan alternatif strategi sebagai berikut: 1) Keberadaan peran pihak pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi bersama tim KP3, Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani dengan 6 (enam) tepat; 2) Keberadaan aparat dalam perencanaan, menyampaikan aturan dan petunjuk penyaluran pupuk bersubsidi

menjadikan petani memahami, memanfaatkan penggunaan pupuk bersubsidi sesuai aturan yang ada; 3) Produsen, distributor dan penyaluran resmi menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, pengelolaan modal usaha dan penyaluran pupuk bersubsidi yang sesuai kebutuhan petani; 4) Keberadaan kelompok tani dalam menerapkan teknologi dan inovasi baru, aplikasi penggunaan pupuk sesuai rekomendasi spesifikasi lokasi; 5) Adanya peran pemerintah memfasilitasi dalam kegiatan, sosialisasi, pelatihan, pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi.

Seluruh kriteria alternatif pada setiap level penentuan analisis strategi pupuk bersubsidi sampai ke petani mempunyai *Overall Inconsistency Ratio* sebesar 0,0; artinya bahwa hasil analisis dapat diterima. Menurut hasil penilaian responden, alternatif kriteria yang harus dioptimalkan adalah kebutuhan pupuk bersubsidi tercukupi merupakan alternatif kriteria penilaian yang diprioritaskan, diperkuat dengan Aparat dapat menyampaikan aturan dan petunjuk berkaitan dengan pupuk bersubsidi, Alokasi pupuk bersubsidi sesuai RDKK, diperkuat dengan jadwal alokasi pupuk bersubsidi per bulan per kecamatan, didukung oleh produsen pupuk bersubsidi, distributor dan penyalur resmi yang menjamin stock pupuk tersedia minimal 2 (dua) minggu sebelum pemakaian dan melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dengan lancar sesuai 6 (enam) tepat, dengan fasilitasi pemerintah dalam mensosialisasikan aturan, petunjuk, melaksanakan verifikasi validasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani di Kabupaten Demak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bintara, 2005. Perencanaan Strategi Pemantapan Ketahanan Pangan. Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara. Prosiding Seminar Strategi Penguatan Ketahanan Pangan.
- BPS Kabupaten Demak. 2013. Demak dalam Angka 2013. Perkembangan Indikator Ekonomi Kabupaten Demak Tahun 2014. Badan Pusat Statistik, Demak
- Brojonegoro, P. S. dan Bambang. 1992. AHP (the Analytical Hierarchy Process). Pusat Antar University – Studi Ekonomi Universitas Indonesia
- Brookins, C. L. 2007. Major Forces and Factors Shaping Global Markets: The Emerging Agricultural World. *Journal of Agribusiness* 25, 1(Spring Time 2007) : 1S 16. Georgia Association of Agricultural Economics.
- Bustanul Arifin. 2010. Strategi Pembangunan pertanian Indonesia.Inspirasi’s Blog di WordPress.com.The Mystique Theme. Universitas Lampung.
- Dadang Arifin DQ. 2013. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional. Universitas Mulawarman, Samarinda.
- David, F. R. 2004. Konsep Manajemen Strategis. Jakarta: PT Indeks.
- Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian,2013. Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2013.. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2013..
- Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian. 2013. Petunjuk Pelaksanaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tahun 2013.
- Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian. 2013. Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2014. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 2014.
- Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian. 2013. Petunjuk Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014.
- Dwijatmiko, S. dan S. Surtini. 2006. Pengaruh Frekwensi Penyuluhan Terhadap Penerapan Adopsi Sapta Usaha Sapi Perah. *Jurnal Sosial Ekonomi Peternakan Volume 2 Nomer 1. Januari 2006. Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan. Universitas Diponegoro. Semarang.*
- Friedman J. 1992. Empowerment: The Politics of Alternative Development, Blackwell Publishers, Cambridge, Massachussets USA
- GardnerB.L. 2000. International Trade and the Future of American Agriculture. Asosiasi Ekonomi Pertanian Georgia. *Journal of Agribusiness* 18 (1), Special Edition (March 2000): 27S40
- Gaynor G. H. 1991. Achieving The Competitive Edge through Integrated Technology Management. McGraw Hill. New York.
- Hua-Yang Lin dan Ping-Yu Hs. 2007. Application of the analytic hierarchy process on data warehouse system selection decisions for small and large enterprises in Taiwan International journal of the computer, internet dan manajemen. 15 (3): 73-93
- Hendrawan, 2011. Penentuan Pola Subsidi dan Sistem Distribusi

- Pupuk di Indonesia. Analisis Kebijakan Pupuk. Jurnal Manajemen dan Agribisnis Vol 8 No. 2.
- Ilham N. 1999. Dampak Kebijakan Tataniaga Pupuk Terhadap Peran Koperasi Unit Desa Sebagai Distributor. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor
- Indraprahasta G. S. 2013. Local Economic Development and Innovation (Studi Kasus di Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). gsyahbana@yahoo.com
- Karyasa, M.Maulana dan Sudi Mardianto,2004. Usulan Tingkat Subsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Relevan serta Perbaikan Pola Pendistribusian Pupuk di Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian. Vol 2,No.3,2004.Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2012. Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2013.
- Kerlinger F. D. dan H. B. Lee. 2000. Foundation of Behavioral Research. USA: Harcourt College.
- Ketut K. 2005. Sistem Integrasi Tanaman-Ternak dalam Perspektif Reorientasi Kebijakan Subsidi Pupuk dan Peningkatan Pendapatan Petani.Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Volume 3 No 1.2005. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian.
- Kumar R. 1999. Research Methodology. London: Sage Publication, ltd.
- Laily N. 2007. Instrument Kebijakan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik.Vol.4,No.1
- Lyford P.L, D.J. Ricks, H.C. Peterson, Sterns J.A. 2002.An Effective Framework for Industry Strategic Planning. Journal of Agribusiness. Georgia Association of Agricultural Economics
- Pasaribu A. M. 2012. Perencanaan dan Evaluasi Proyek Agribisnis (Konsep dan Aplikasi). Lily Publisher, Yogyakarta
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70. 2011. Tentang Pupuk Organik,Pupuk Hayati dan Pemberah Tanah.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:15/M-DAG/PER/4/2013. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian R INomor: 122/PERMENTAN/SR.130/11/20 13. Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian TA 2014.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.54. 2014. Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di masing-masing Kabupaten TA 2014.
- Peraturan Bupati Demak No.32. 2014. Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di masing-masing Kecamatan TA 2014.
- Perubahan Peraturan Bupati No.43. 2014. Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di masing-masing Kecamatan TA 2014.

- Porter, M. E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*: The Free Press. New York.
- Pietra S. 2004. *Langkah Awal Menjadi Enterpreneur Sukses*, Jakarta PT. Elex Media Komputindo
- Petrokimia Gresik. 2011. *Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi*.
- Rangkuti F. 2005. Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis: reorientasi konsep perencanaan strategis untuk menghadapi abad 21. Cetakan kedua belas. PT Gramedia pustaka utama. Jakarta
- Rachman B,2009. Tinjauan Terhadap Aspek Tenis,Manajemen dan Regulasi.Analisis Kebijakan Pupuk. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Saragih AE. 2012. *Suara Dari Bogor: Membangun Opini Sistem Agribisnis*. Bogor: IPB Press.
- Septiani, W. 2009. Pendekatan kombinasi metode AHP dan Metode Cut Off Point pada tahap analisis keputusan perancangan sistem informasi penjualan PT. X JETI UNDIP, 4(3): 218-227
- Setiyadi, Amar, dan T. Aji. 2011. Penentuan strategi sustainability usaha pada UKM kuliner dengan menggunakan metode SWOT-AHP. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*. 10 (2). 68-77.
- Sjari, Dewi Ratna. 2006. Pengaruh Subsidi Harga Pupuk terhadap Pendapatan Petani.Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi.Jurnal dan Prosiding Pusat Data Ekonomi dan Bisnis.Universitas Indonesia.
- Spudnik S. 2011. *Sistem Distribusi Berbasis Relationship. Kajian Penyempurnaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani*. Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Subiyakto. 1996. *Manajemen Agribisnis*. Kanisius, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12. 1992. Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- Undang-Undang Nomor 8. 1999. Tentang Perlindungan Konsumen.
- Uphieflutterby. 2011. *Sejarah Perkembangan Pembangunan Pertanian di Indonesia*.Just another WordPress.com site.
- Wahyuni S. 2003. *Kinerja Kelompok Tani dalam Sistem Usaha Tani Padi dan Metode Pemberdayaannya*. *Jurnal Litbang pertanian*, 22 (1), 2003
- Yang, J. and P. Shi. 2002. Applying analytic hierarchy process in firm's overall performance evaluation: a case study in china". *International journal of Business*, 7 (1): 29-46
- Zaenal S. 2008. *Teliti Kebijakan Subsidi Pupuk Anorganik*.Universitas Gajah Mada,Yogyakarta.